

Kepemimpinan Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo Dalam Pemerintahan Jawa Timur (1945-1947)

Dewa Ighaniyyu Padra Karna¹, Sutyah², Dadan Adi Kurniawan³

¹Sebelas Maret University, Indonesia

²Sebelas Maret University, Indonesia

³Sebelas Maret University, Indonesia

dewadasilva@student.uns.ac.id, sutyah@staff.uns.ac.id, dadanadikurniawan@staff.uns.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 27, 2024

Revised December 18, 2024

Accepted December 29, 2024

Available online December 30, 2024

Keywords:

Leadership, Government Policy, Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo, Governor.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo dalam pemerintahan Jawa Timur 1945-1947. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo memiliki sifat dan karakter yang rendah hati namun tegas dan berwibawa. Dalam kehidupan sehari-hari, ia merupakan pribadi yang disiplin dan penyayang terhadap keluarganya. Berbeda dengan saat berhadapan dengan perwira Jepang dan Inggris, ia dikenal sebagai tokoh pemberani yang menentang kebijakan luar negeri yang dianggap merugikan rakyat Jawa Timur. Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo mengawali pendidikannya di Sekolah Pegawai Daerah Madiun hingga diangkat menjadi Syucokkan atau Residen Bojonegoro pada masa penjajahan Jepang. Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo resmi menjabat sebagai gubernur pada tanggal 12 Oktober 1945. (2) Dalam pemerintahan Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo membuat berbagai kebijakan seperti di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penghimpunan dana, pengembangan pertanian dan koperasi, serta peningkatan perdagangan. Raden Mas Suryo memiliki peran penting terkait keputusannya menolak perintah ultimatum tentara Sekutu yang berujung pada pertempuran besar. Sebagai seorang pemimpin, Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo mampu membangkitkan semangat para pejuang dan rakyat Jawa Timur dalam menghadapi pasukan Sekutu dalam pertempuran 10 November 1945.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo leadership in the East Java government 1945-1947. The method used in this research is historical method. The result of the study state that: (1) Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo has a humble but firm and authoritative nature and character. In everyday life, he is a disciplined and loving person in his family. In contrast to when dealing with Japanese and British officers, he was known as a brave figure who opposed foreign policies which were considered detrimental to the people of East Java. Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo began his education at the Madiun regional civil service school until he was appointed as *Syucokkan* or Resident of Bojonegoro during Japanese rule. Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo officialy served as governor on October 12, 1945. (2) In the East Java government, Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo made various policies such as in the health sector, education, community empowerment, raising funds, developing agriculture and cooperatives, and increasing trade. Raden Mas Suryo had an important role regarding his decision to reject the Allied army's ultimatum order which led to a major battle. As a leader, Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo was able to raise the spirit of the fighters and people of East Java in facing the Allied troops in the battle of 10 November 1945.

1. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi tertua yang berdiri setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan tujuh provinsi lainnya seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, Sunda Kecil, Maluku, dan Sulawesi (Gischa, 2022: 1). Pada masa pemerintahan Jepang, masyarakat Jawa Timur mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Rakyat dipaksa untuk bekerja keras tanpa dibayar dan wajib menyerahkan seluruh hasil sumber daya alam kepada Pemerintah Jepang. Barang siapa yang tidak tunduk dan mentaati perintah, maka para tentara Jepang tidak segan untuk menyiksa bahkan membunuh rakyat.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi berdiri sebagai negara merdeka setelah Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Berita mengenai kemerdekaan hanya baru terdengar sampai ke beberapa wilayah di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Jepang masih berusaha untuk menutupi informasi dari telinga rakyat. Sementara itu di Surabaya para pemimpin perjuangan mulai mempersiapkan rakyat untuk bergerak melawan dan mengambil kembali kekuasaan dari tentara Jepang (Sutjiatiningsih, 1977: 68). Pasca kemerdekaan beberapa wilayah di Indonesia saling berupaya untuk mempertahankan kedaulatan. Tidak berlangsung lama kedatangan tentara Sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 membuat kekhawatiran masyarakat Jawa Timur khususnya Surabaya.

Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Albertine Walters Sothern Mallaby mengeluarkan ultimatum pada tanggal 27 Oktober 1945 berisi perintah kepada masyarakat Surabaya untuk menyerahkan senjatanya paling lambat 48 jam (Zuhriyah, 2023: 2). Rakyat yang tidak ingin merasakan dijajah kembali melakukan perlawanan terhadap tentara Inggris. Dalam peristiwa itu mengakibatkan terbunuhnya Brigadir A.W.S Mallaby oleh pejuang rakyat Surabaya sehingga membuat pasukan Inggris murka, sehingga mengeluarkan ultimatum kedua pada 9 November 1945 yang berisi perintah terhadap rakyat Surabaya untuk segera menyerah apabila tidak ingin digempur melalui serangan darat, laut, maupun udara. Gubernur Jawa Timur bersama rakyat menolak untuk mentaati perintah Inggris, sehingga menjadi pemicu terjadinya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang berlangsung selama kurang lebih tiga minggu (Kusuma dkk., 2021: 2).

Timbulnya beberapa pergerakan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan membuat jalannya fungsi pemerintahan menjadi terhambat seperti halnya di provinsi lainnya. Perpindahan pusat pemerintahan Jawa Timur kerap terjadi seiring terdesak oleh pasukan *Nederland Indische Civil Administration* (NICA) dan sekutu. Pada tanggal 17 November 1945, atas saran Tentara Keamanan Rakyat (TKR) memaksa seorang gubernur memindahkan kedudukan pemerintahan lagi ke wilayah Kediri akibat pertempuran semakin memanas. Berhubung keadaan di Kediri semakin mencekam, maka berpindah lagi ke Malang pada Februari 1947 hingga akhirnya kembali lagi ke Surabaya setelah penyerahan kedaulatan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 (Yousri, 2012: 54).

Dari permasalahan dan gejolak yang terjadi di wilayah Jawa Timur tidak terlepas dari kepemimpinan seorang tokoh yang jarang diketahui dan dikenal oleh publik yaitu Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo atau biasa dikenal Raden Mas Suryo. Raden Mas Suryo merupakan salah satu tokoh penting yang berjasa dalam tata pemerintahan yang terlibat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Perjalanan hidup seorang Raden Mas Suryo hingga menjadi pemimpin tertinggi di Provinsi Jawa Timur tidak mudah. Raden Mas Suryo baru pindah ke Surabaya untuk menduduki jabatan sebagai gubernur pada tanggal 12 Oktober 1945. Penunjukkan dirinya sebagai gubernur berdasarkan pengalaman dan pengabdianya selama menjadi anggota pamong praja di pemerintahan. Oleh karena itu, Raden Mas Suryo cukup paham mengenai kondisi dan karakter masyarakat Jawa Timur (Agustina, 2020: 1).

Kajian maupun penelitian mengenai Raden Mas Suryo atau Gubernur Suryo sebenarnya masih belum banyak dan cukup terbatas seperti yang ditulis oleh Achmad Dani dan Sri Purwaningsih (2017) tentang Kepemimpinan Gubernur Suryo Selama Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang membahas mengenai peran Gubernur Suryo sebagai pemimpin tertinggi Jawa Timur dan pergerakan rakyat Surabaya dalam melawan tentara Sekutu di pertempuran 10 November 1945. Penelitian yang ditulis Rentiniat Lase, YB Jurahman, dan Subaryana (2021) tentang Pertempuran 10 November Di Surabaya Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Kemerdekaan Indonesia yang membahas latar belakang terjadinya pertempuran 10 November serta respon Gubernur Suryo terhadap kedatangan tentara Sekutu di Surabaya. Penelitian Puspasari Setyaningrum (2022) tentang Biografi Ario Soerjo, Gubernur Pertama Jawa Timur, membahas mengenai asal-usul Gubernur Suryo serta perannya dibalik peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Kepemimpinan Raden Mas Suryo dalam menjalankan serta mengatur jalannya pemerintahan pada masa revolusi termasuk saat terjadinya peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya mengalami banyak gejolak dan persoalan sehingga cukup menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Kepemimpinan Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo dalam Pemerintahan Jawa Timur tahun 1945-1947"

2. KAJIAN TEORI

2.1. Kepemimpinan

Pemimpin merupakan seorang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih baik keluarga maupun organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memimpin, mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Suradinata, 1995: 11). Kepemimpinan menurut Soekanto (2001: 318) adalah kemampuan seorang *leader* untuk mempengaruhi pengikut-pengikutnya supaya patuh sebagaimana yang diperintahkan atau dikehendaki oleh *leader* tersebut. Menurut Terry (2010: 153) kepemimpinan adalah hubungan yang terdapat dalam diri seseorang untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain supaya bekerja secara sadar demi mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin mempunyai tantangan yang cukup berat yaitu menggerakkan anggotanya agar bersedia bekerja sesuai kemampuan terbaik untuk mencapai tujuan Bersama.

Dalam upaya mewujudkan tujuan sebuah organisasi, maka diperlukan seorang pemimpin yang dapat melaksanakan fungsi kepemimpinan dengan baik. Menurut Rivai dan Mulyadi (2011: 34) fungsi kepemimpinan terdiri dari lima fungsi pokok, yaitu: (1) Fungsi Intruksi, pemimpin berperan sebagai komunikator, artinya orang yang menentukan segalanya termasuk perintah untuk dapat dilaksanakan secara efektif oleh orang lain, (2) Fungsi Konsultasi, sebagai seorang pemimpin tentu membutuhkan orang lain untuk saling bertukar pendapat atau sekedar berkonsultasi sebelum mengambil sebuah keputusan, (3) Fungsi Partisipasi, pemimpin berusaha untuk mengaktifkan orang-orang dibawahnya untuk dapat menjalankan fungsi ini, baik dalam keikutsertaan sebuah kegiatan maupun mengambil keputusan, (4) Fungsi Delegasi, didasarkan pada kepercayaan terhadap pelimpahan wewenang maupun menetapkan sebuah keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin, (5) Fungsi Pengendalian, pemimpin dianggap berhasil apabila dalam kepemimpinannya mampu mengatur aktivitas setiap anggotanya secara terarah dan berkoordinasi secara efektif dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan maksimal.

Pada dasarnya tugas seorang pemimpin yaitu menggerakkan dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh anggotanya untuk mencapai hasil yang optimal. Terdapat beberapa tugas utama yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin, diantaranya sebagai berikut: (1) Memberikan susunan kerangka yang jelas untuk dijadikan pegangan bagi anggota dibawahnya. Dengan adanya kerangka tersebut, maka dapat diketahui skala prioritas terkait keputusan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan yang ada, (2) Melakukan pengawasan dan menyalurkan perilaku masyarakat yang dipimpinnya, (3) Sebagai wakil kelompok (Soekanto, 2001: 326).

Peran seorang pemimpin dalam organisasi dapat mempengaruhi motivasi dan prestasi kerja anggotanya (Abijaya & Eka, 2021: 17). Kedudukan seorang pemimpin di sebuah organisasi sangat strategis dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Covey yang dikutip Rivai (2003: 149) menyebutkan terdapat tiga bagian dalam peran kepemimpinan, yaitu: (1) Pencarian alur, artinya pemimpin berperan dalam menentukan visi dan misi organisasi, (2) Penyelaras, artinya pemimpin memastikan bahwa dalam mencapai visi dan misi didukung oleh struktur dan sistem organisasi. (3) Pemberdaya, artinya peran untuk membangkitkan semangat dalam diri setiap individu supaya mampu menggunakan bakat, kemampuan, dan kreativitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Dalam kepemimpinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi pemimpin. Kartono (2011: 36-37) menyebutkan konsep syarat kepemimpinan berkaitan dengan tiga hal penting, yaitu: (1) Kekuasaan, artinya pemimpin mempunyai kekuatan, otoritas, dan legitimasi dalam memberikan wewenang dan mempengaruhi anggota bawahannya untuk melakukan sesuatu, (2) Kewibawaan, artinya pemimpin mempunyai kelebihan dan keunggulan untuk mengatur anggota bawahannya agar bersedia

melakukan pekerjaan, (3) Kemampuan, artinya pemimpin mempunyai ketrampilan, kesanggupan, dan segala daya teknis maupun lebih tinggi daripada anggota dibawahnya.

Dalam kepemimpinan Jawa, seseorang cenderung lebih menonjolkan figur kepemimpinan daripada sistem kepemimpinannya. Menurut Endraswara dalam Sunarni (2016: 561) ciri kekuasaan Jawa dalam hal suksesi antara lain: (1) pengganti pimpinan harus *trahing kusuma rembesing madu* yang berarti mempertimbangkan masalah keturunan, (2) ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya yang memenuhi kriteria, sehingga harus *sendika dhawuh* atau mengikuti perintah maka tidak dapat menolak, (3) tanpa adanya periodisasi kepemimpinan artinya yang bersangkutan akan turun tahta atau belum.

Konsep kekuasaan di Jawa memiliki karakteristik berkaitan dengan wibawa dan kharismatik seorang pemimpin dalam hal kepemimpinan. Ali (1986:24-25) dan Setiawan (1996: 8-11) menyebutkan beberapa karakteristik kekuasaan di Jawa, yaitu: (1) Kekuasaan adalah sentralistik, tidak memancar, tidak bertambah atau kurang, dan cenderung terkonsentrasi dengan kekuasaan lain. Tidak ada kekuatan lain yang terlepas dari pusat kekuasaan karena dapat mengganggu kestabilan, keharmonisan dan mengancam keberadaan pemimpin kekuasaan tersebut, (2) Kekuasaan dari alam atau adikodrati tunggal seperti teori kedulatan rakyat. Implikasinya yaitu tidak perlu adanya kekuasaan, justifikasi serta keabsahan moral sehingga pemimpin tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap rakyat.

2.2. Penokohan

Menurut Jones dalam Nurgiyantoro (1995: 165) penokohan merupakan gambaran jelas seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penokohan adalah proses ditampilkannya tokoh beserta watak, sifat maupun kebiasaan dengan jelas yang terdapat dalam sebuah cerita (Milawasri, 2017: 89). Dilihat dari segi pandangan tokoh dalam sebuah cerita, terdapat tokoh utama (*main character*) dan tokoh tambahan (*peripheral character*). Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak muncul dalam sebuah cerita untuk menentukan perkembangan alur, sedangkan tokoh tambahan hanya muncul sekali atau beberapa kali saja.

Abrams dalam Nurgiyantoro (2002: 188-189) membedakan tokoh berdasarkan kriteria perwatakan, yaitu tokoh statis (*static character*) dan tokoh berkembang (*developing character*). Tokoh statis merupakan tokoh dalam sebuah cerita yang tidak mengalami perubahan sebagai akibat terjadinya peristiwa. Tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan jalannya alur peristiwa.

Nurgiyantoro (2013: 297) prinsip penokohan merupakan proses untuk mengidentifikasi tokoh dalam suatu karya. Dalam proses identifikasi penokohan terdapat beberapa prinsip diantaranya: (1) Prinsip pengulangan, artinya prinsip yang dilakukan dengan mengidentifikasi adanya persamaan sifat, karakter, dan perilaku untuk mengungkapkan kepribadian tokoh dalam suatu cerita, (2) Prinsip pengumpulan, artinya prinsip yang dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai kepribadian tokoh yang ada dalam cerita guna mendapatkan gambaran secara jelas, (3) Prinsip kemiripan dan pertentangan, artinya prinsip yang dilakukan dengan membandingkan antar sesama tokoh dalam suatu cerita. Setiap tokoh biasanya memiliki persamaan sifat dengan tokoh lain, namun tentu saja terdapat perbedaan yang lain dalam hal lain.

Dengan demikian, istilah penokohan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada tokoh dan perwatakan sebab mencakup beberapa hal, seperti permasalahan siapa tokoh cerita, bagaimana watak, dan bagaimana penempatan dalam sebuah cerita sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap pembaca.

2.3. Pemerintahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah: 1) Sistem yang menjalankan sebuah wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara serta bagian di dalamnya, 2) sekumpulan orang yang saling bersama mengemban tanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan, 3) penguasa sebuah negara. Menurut Surbakti (1992: 167) pemerintah diselenggarakan untuk menentukan berbagai kebijakan, memperkirakan perkembangan masa yang akan datang, serta mengarahkan masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan daerah otonom

oleh pemerintah daerah serta DPRD berdasarkan sentralisasi dengan unsur penyelenggara berupa gubernur, bupati, dan perangkat daerah.

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menyangkut urusan pembagian urusan rumah tangga atau urusan pemerintahan. Pada hakekatnya urusan pemerintahan terbagi menjadi dua yaitu segala urusan pemerintahan dilakukan penuh oleh pemerintah tanpa asas desentralisasi dan bagi pemerintahan yang diselenggarakan dengan asas desentralisasi biasanya tidak dilaksanakan secara penuh. Bagir Manan (2001: 26) mendefinisikan urusan rumah tangga sebagai tatanan yang saling berhubungan dengan mengelompokkan antara tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam mengurus serta mengelola pemerintah pusat dan daerah.

Hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah terjadi akibat adanya pembagian penyelenggaraan negara yang diwujudkan dalam berbagai tindakan. Model pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menurut Clarke dan Stewart dalam Huda (2007: 7) terbagi menjadi tiga diantaranya: (1) *The Relative Autonomy Model*, pemerintah daerah mendapat kebebasan dengan luas namun tetap menghormati keberadaan pemerintah pusat. Kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah merupakan tugas dan kewajiban yang telah dirumuskan oleh peraturan undang-undang, (2) *The Agency Model*, pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan yang besar dan hanya terlihat sebagai agen pemerintah pusat dengan mekanisme kontrol yang tinggi, (3) *The Interaction Model*, dalam hal ini keberadaan dan fungsi pemerintah daerah ditentukan oleh hubungan dengan pemerintah pusat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Agustus 2023 hingga Juli 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah-langkah yang dilakukan dengan menggunakan metode ini meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan yaitu sumber primer berupa arsip *Algemene Secretarie*, arsip *Delegasi Indonesia*, arsip *Stensilan Pamfle*, arsip *Puro Pakualaman*, surat kabar *Asia Raya 1945*, surat kabar *Warta Bodjonegoro-Syu*, Majalah *Moderna 1969*, dan foto-foto yang berhubungan dengan Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo di pemerintahan Jawa Timur, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, skripsi yang relevan, serta internet. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data historis dengan pendekatan politik.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sifat, Karakter, dan Perjalanan Karir Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo

Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo atau biasa dipanggil Raden Mas Suryo lahir pada Selasa Kliwon tanggal 9 Juli 1898 di daerah Magetan, Jawa Timur. Raden Mas Suryo merupakan anak kedua dari sepuluh bersaudara dan termasuk dalam golongan *elite* atau bangsawan di daerah asalnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Raden Mas Suryo serba berkecukupan sehingga tidak pernah merasakan kekurangan seperti yang dialami kebanyakan rakyat pada umumnya (Dani dan Purwaningsih, 2017: 7). Raden Mas Suryo mempunyai ayah bernama Raden Mas Wiryosumarto yang menjabat sebagai Wedana Punung hingga pensiun di daerah Pacitan, Jawa Timur. Ibu Raden Mas Suryo bernama Raden Ayu Kustiah yang merupakan keturunan dari Raden Ronggo Prawirodirdjo III (1710-1810), seorang panglima perang Pangeran Diponegoro yang cerdas dan gagah berani dalam menentang Gubernur Jenderal Daendels pada waktu itu (Sutjiatningsih, 1977: 25).

Pada saat masih kecil, Raden Mas Suryo termasuk anak yang jahil dan suka membuat guyonan. Raden Ajeng Kustinah (adiknya) juga mengungkapkan bahwa Raden Mas Suryo paling bandel dan pemberani diantara saudara yang lainnya. Watak keberaniannya sudah terlihat sejak kecil dalam bertindak melakukan sesuatu tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan kepentingan bersama orang lain. Raden Mas Suryo sudah terbiasa bermain dan bergaul bersama anak-anak rakyat biasa, sehingga tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari mereka (Sutjiatningsih, 1977: 29).

Dalam pergaulan di lingkungan sekolahnya, Raden Mas Suryo sering berkelahi dengan anak-anak Belanda dan Cina yang suka mengejek serta menghina anak-anak pribumi. Meskipun nakal dan suka berkelahi, Raden Mas Suryo tetap patuh mendengarkan nasehat orang tuanya serta hanya ingin membela anak-anak pribumi

dari ejekan dan hinaan (Sutjiatiningsih, 1977: 35). Karakter Raden Mas Suryo yang berani dan peduli terhadap sesama sudah terlihat sejak duduk di bangku sekolah. Raden Mas Suryo tidak tinggal diam melihat teman-teman seperjuangannya direndahkan oleh anak-anak Belanda dan Cina. Dari sikap yang ditunjukkan Raden Mas Suryo terbukti terdapat jiwa patriot yang berani menentang perlakuan bangsa Belanda terhadap rakyat pribumi. Rasa simpati tersebut muncul ketika temannya mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah Belanda. Harga diri sebagai putra bangsa telah lahir dalam diri Raden Mas Suryo yang tidak ingin dihina dan direndahkan oleh bangsa lain (Sutjiatiningsih, 1977: 34).

Raden Mas Suryo memulai pendidikannya di Sekolah Ongko Loro kemudian pindah ke *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Raden Mas Suryo melanjutkan sekolahnya di *Opleidings School Voor Indlandsche Ambtenaar* (O.S.V.I.A) di Madiun. Raden Mas Suryo berhasil menamatkan sekolahnya pada tahun 1918 untuk kemudian diangkat menjadi *Assistant Indlandsche Bestuursambtenaar* di kantor urusan Ngawi.

Selama kurang lebih dua tahun, Raden Mas Suryo dipindahkan ke Madiun untuk menjadi seorang Mantri *Veld Politie* pada tahun 1920. Raden Mas Suryo menyelesaikan sekolahnya tahun 1922, kemudian beliau kembali ke Jawa Timur ditempatkan sebagai Asisten Wedana atau Camat di wilayah Glodog, Madiun (Sutjiatiningsih, 1977: 42). Pada tahun 1926 Raden Mas Suryo naik jabatan menjadi Wedana di wilayah Pacitan selama dua tahun. Raden Mas Suryo setelah lulus tahun 1928 mendapat tugas di wilayah Mojokerto dan melakukan pekerjaannya dengan baik serta tidak membeda-bedakan jenis golongan tertentu rakyatnya.

Pada tahun 1933, Raden Mas Suryo kembali dipindahkan ke daerah Porong, Sidoarjo untuk menyelesaikan persoalan banjir yang terjadi setiap tahun di wilayah tersebut. Pada tahun 1938, Raden Mas Suryo kembali ke daerah asalnya untuk menjabat sebagai Bupati Magetan menggantikan Raden Adipati Aryo Hadiwinoto. Saat menjadi Bupati Magetan, Raden Mas Suryo menjadi pemimpin yang melindungi rakyatnya dari tindakan sewenang-wenang Pemerintah Jepang. Keberanian dan ketegasan Raden Mas Suryo terlihat saat kedatangan tentara Jepang sekitar tahun 1943 dalam keadaan marah dan membawa pedang membuat pegawai pemerintahan yang sedang berada di kantor mengalami ketakutan (Johari, 2019: 1). Raden Mas Suryo justru mendatangi tentara Jepang tersebut dengan tegas untuk berbicara langsung dan menegurnya karena dianggap mengganggu kenyamanan kerja di kantor.

Peristiwa keributan yang terjadi di kantor bupati Magetan justru menguntungkan bagi Raden Mas Suryo. Selang beberapa waktu, Raden Mas Suryo diangkat sebagai *Syucokan* atau Residen Bojonegoro pada tahun 1943 hingga 1945 oleh Jepang atas kekaguman terhadap dirinya (Setyaningrum, 2022: 1). Raden Mas Suryo termasuk salah satu orang Indonesia yang terpilih menduduki jabatan penting masa Pemerintahan Jepang. Penunjukkan sebagai residen tidak terlepas dari kinerja pengabdian Raden Mas Suryo sebagai pamongpraja serta karakter yang dimilikinya. (Sutjiatiningsih, 1977: 61-62).

Pada akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia, Raden Mas Suryo menjadi salah satu pemimpin yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Raden Mas Suryo hampir mencapai puncak karirnya sebagai pegawai pamong praja setelah berpindah-pindah dan ditempatkan di berbagai wilayah di Jawa Timur. Dari berbagai pengalamannya itulah membuat Raden Mas Suryo mengenal baik daerah ini beserta karakter rakyatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Raden Mas Suryo mencapai puncak karirnya ketika Pemerintah Pusat Republik Indonesia mengangkat dirinya sebagai Gubernur pertama Provinsi Jawa Timur (Sutjiatiningsih, 1977: 70).

4.2 Kepemimpinan Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo Dalam Pemerintahan Jawa Timur Tahun 1945-1947

4.2.1 Kebijakan-kebijakan Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo di Jawa Timur tahun 1945-1947

Sesuai dengan keputusan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18-22 Agustus 1945, pemerintah pusat mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hasil sidang yang lainnya yaitu menetapkan pembagian wilayah provinsi dengan masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Dalam hal ini, Raden Mas Suryo diangkat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur pertama oleh pemerintah pusat. Salah satu aspek penting yang ada dalam pemerintahan Gubernur Suryo pada masa awal kemerdekaan adalah kebijakan sosial. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membangun sebuah pondasi yang kuat dan menyatukan seluruh masyarakat Jawa Timur dalam semangat kemerdekaan. Beberapa kebijakan diantaranya dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal kesehatan, Gubernur Suryo mendorong peningkatan pelayanan Kesehatan di seluruh wilayah Jawa Timur dengan upaya menambah tenaga dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan program-program yang menunjang kesehatan masyarakat. Gubernur Suryo juga menekankan pentingnya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan. Gubernur Suryo mendukung perbaikan fasilitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur seperti sekolah dengan tujuan memberikan akses pendidikan yang merata kepada masyarakat. Pada awal bulan September 1945 dibentuk sebuah federasi bernama Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI) sebagai hasil konsolidasi antara rakyat, pemuda, dan pemimpin perjuangan. Program-program yang dijalankan organisasi Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI) diantaranya mendirikan pos-pos pertolongan dan membentuk laskar putri. Gubernur Suryo mendorong partisipasi aktif dari para pemuda dan perempuan melalui gerakan-gerakan sosial untuk turut mempertahankan kemerdekaan.

Pada masa pemerintahan Gubernur Suryo, aspek ekonomi menjadi salah satu fokus pusat perhatian untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Pengangkatan dirinya sebagai Gubernur pada masa revolusi membuat tidak banyak yang bisa dilakukan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Gubernur Suryo melakukan beberapa upaya kebijakan untuk menghadapi tantangan ekonomi pasca kemerdekaan seperti melakukan penghimpunan dana, mengembangkan pertanian dan koperasi, dan meningkatkan perdagangan.

Dalam hal penghimpunan dana, Gubernur Suryo bekerja sama dengan Ketua Perserikatan Dagang keturunan Tiongkok bernama Moogje Widjaja atau Oei Chiao Liong. Gubernur Suryo memerintahkan Widjaja untuk segera bergerak mengorganisir dan mengumpulkan para pemuda di daerah Kembang Jepun. Kegiatan penghimpunan dana berhasil mendapatkan uang derma sekitar dua ratus ribu rupiah. Uang tersebut langsung diserahkan kepada Gubernur Suryo kemudian digunakan untuk membiayai segala keperluan yang berkaitan dengan perjuangan rakyat.

Gubernur Suryo mendorong sektor pertanian untuk meningkatkan produksi padi dan komoditas pertanian lainnya dengan tujuan mencukupi kebutuhan pangan. Disamping itu, ia turut mengupayakan perkembangan sektor perkebunan seperti kopi, kelapa, teh, dan kakao. Tidak hanya fokus dalam sektor pertanian, Gubernur Suryo juga aktif dalam mempromosikan koperasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Beberapa koperasi yang masih aktif sejak pendudukan Jepang diantaranya Koperasi Tumapel, Koperasi Rakyat Batu, Pusat Koperasi Rakyat Blitar, Koperasi Rakyat Malang, dan Koperasi Bakti.

Seiring berjalannya waktu, lalu lintas perdagangan di Jawa Timur kembali berkembang pesat setelah berbagai aturan yang dibuat pemerintah Jepang telah dihapus. Gubernur Suryo mengambil langkah untuk memperbaiki jaringan jalan maupun akses yang digunakan untuk memindahkan barang antar wilayah. Akses lintasan jalur perdagangan diperlancar dengan adanya alat transportasi milik Jawatan Kereta Api RI (DKA) dan Jawatan Angkutan Motor RI (DAMRI). Keberadaan alat transportasi tersebut cukup penting bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli (Sukadri dkk., 1991: 213).

4.2.2 Sikap RMT. Ario Soerjo Selama Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya

Raden Mas Suryo telah tiba di Surabaya untuk menduduki jabatan yang baru sebagai gubernur pada tanggal 12 Oktober 1945. Keadaan di Surabaya pada saat itu begitu memanas, laskar-laskar perjuangan dan seluruh rakyat Surabaya bergelora dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Raden Mas Suryo telah tiba di Surabaya untuk menduduki jabatan yang baru sebagai gubernur pada tanggal 12 Oktober 1945. Keadaan di Surabaya pada saat itu begitu memanas, laskar-laskar perjuangan dan seluruh rakyat Surabaya bergelora dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 beberapa pesawat Inggris menyebarkan pamflet atau selebaran melalui udara tanpa sepengetahuan pihak Pemerintah Republik Indonesia. Pamflet berisi mengenai rencana Sekutu untuk menguasai kota-kota utama di Jawa serta memerintahkan seluruh rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjatanya kurang lebih dalam waktu 48 jam. Situasi di sekitar Gedung Internatio memanas setelah para pejuang bentrok dan mengepung markas para tentara Inggris. Brigadir A.W.S Mallaby memerintahkan Kapten Shaw dan pasukannya untuk melemparkan granat dari dalam

gedung. Dalam peristiwa itu, pimpinan tentara Inggris yakni Brigadir A.W.S Mallaby gugur tertembak oleh salah satu pejuang rakyat Surabaya.

Keesokan harinya, Inggris kembali mengeluarkan ultimatum terhadap rakyat Surabaya dan seluruh pemimpin perjuangan untuk menyerahkan senjatanya dan menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat. Apabila perintah tersebut tidak dilaksanakan, maka Inggris akan mengerahkan semua kekuatan militernya untuk menghancurkan Kota Surabaya beserta dengan rakyatnya (Sutjiatiningsih, 1977: 134). Menanggapi ultimatum pihak Inggris, Gubernur Suryo dengan didampingi Doel Arnowo berbicara di depan corong Radio Surabaya. Gubernur Suryo menyampaikan pidatonya dengan nada yang jelas dan tegas berisi ajakan terhadap seluruh masyarakat untuk senantiasa menegakkan kemerdekaan dan berani menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris dan tetap berpegang teguh "Lebih baik hancur daripada dijajah kembali" sehingga akan melakukan perlawanan bersama rakyat, Polisi, Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan badan perjuangan lainnya (Evita dkk.,2017: 148).

Tentara Inggris dapat memasuki dan menduduki Kota Surabaya setelah mendapatkan perlawanan selama 21 hari oleh pejuang rakyat. Dengan adanya berbagai gejolak yang terjadi, pemerintahan harus tetap berjalan di bawah tekanan tentara Inggris (Sutjiatiningsih, 1977: 157). Gubernur Suryo bersama staf-stafnya memutuskan untuk menyingkir ke daerah Sepanjang sebelum ke Mojokerto. Atas saran Tentara Keamanan Rakyat Pemerintahan Karesidenan Surabaya harus segera dipindahkan ke Mojokerto dan pada saat itu kondisi pemerintahan sedang kacau dan tidak teratur, kantor-kantor tempat bekerja terpaksa harus dipindahkan (Sutjiatiningsih, 1977: 159). Pertempuran 10 November 1945 telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya kehilangan nyawanya dan 150.000 orang terpaksa untuk meninggalkan kota. Sedangkan tentara Inggris yang tewas maupun luka-luka sebanyak 1.600 prajurit serta puluhan amunisi perang hancur (Faizah, 2023: 1).

4.2.3. Akhir Masa Pemerintahan RMT. Ario Soerjo

Pada awal tahun 1947 tentara Belanda berhasil menduduki wilayah Krian dan Sidoarjo, maka Pemerintah Daerah Jawa Timur berpindah lagi ke Malang diikuti oleh Gubernur Suryo dan staf-stafnya. Perpindahan pusat pemerintahan kerap dilakukan seiring kembalinya tentara Belanda untuk menguasai wilayah Indonesia. Para pejuang juga menyingkir ke Malang dan memilih bertahan di perkampungan serta gunung-gunung setelah beberapa daerah seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dikuasai oleh Belanda (Sutjiatiningsih, 1977: 159-160).

Gubernur Suryo pada bulan Juni 1947 mendapatkan tugas baru sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Yogyakarta. Raden Mas Suryo memulai tugas barunya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang ikut mendampingi Wakil Presiden Drs.Mohammad Hatta melakukan kunjungan ke Sumatera. Pada saat Ketua Dewan Pertimbangan Agung yaitu R.A. Achmad Wiranatakusuma menderita sakit, Raden Mas Suryo menggantikan beliau sebagai ketua. Pada masa inilah munculnya peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948. Pemberontakan tersebut menyebabkan beberapa korban jiwa salah satu diantaranya adalah adik Raden Mas Suryo yakni Raden Mas Sarjuno yang menjabat sebagai Wedana di daerah Sepanjang (Sutjiatiningsih, 1977: 170).

Mendengar berita tentang kematian adiknya, Raden Mas Suryo merasa sangat terpukul dan kehilangan. Dirinya tidak dapat menghadiri langsung pemakaman adik tercinta karena harus melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat ditinggalkan. Pada tanggal 10 November 1948, Raden Mas Suryo berkesempatan untuk menghadiri acara 40 hari wafat adiknya di Madiun. Beberapa rekan Raden Mas Suryo termasuk Bung Hatta telah memperingatkan agar perjalanan ke Madiun ditunda dulu saja. PKI telah berhasil ditumpas, namun keadaan di Madiun dan sekitarnya belum sepenuhnya aman dari sisa-sisa orang komunis yang berhasil melarikan diri (Sutjiatiningsih, 1977: 170).

Raden Mas Suryo tetap bersikeras untuk pulang ke Madiun bagaimanapun juga ingin menghadiri acara peringatan wafat adiknya. Bung Hatta menyarankan agar kepulangan dirinya ke Madiun dengan membawa beberapa pengawal untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Perjalanan sampai di Kota

Solo dan hari sudah menjelang malam, salah seorang rekannya yakni Pak Diro yang merupakan Residen Solo menyarankan agar bermalam di kediamannya.

Keesokan harinya Raden Mas Suryo bersama dua pengawalnya kembali melanjutkan perjalanan ke Madiun. Menjelang sore hari, sampailah mereka di kawasan hutan jati Kedunggal, Ngawi. Hutan tersebut merupakan tempat persembunyian anggota PKI yang berhasil meloloskan diri dari kejaran tentara Indonesia. Saat melintasi jalan tersebut, mobil Raden Mas Suryo dan pengawalnya berpapasan dengan sisa-sisa gerombolan PKI yang sedang berada di kawasan hutan (Sutjiatiningsih, 1977:171).

Gerombolan PKI memberhentikan mobil Raden Mas Suryo bersama pengawalnya dan mobil anggota Kepolisian Republik Indonesia yakni Komisariss Besar M. Doerjat dan Komisariss Soeroko yang juga sedang melintas dan kemudian membakarnya (Jannah, 2023: 2). Mereka menahan Raden Mas Suryo bersama empat orang lainnya dan membawanya ke dalam hutan Sonde yang berjarak sekitar 5 kilometer dari tempat ia diberhentikan. Pada pagi hari tanggal 12 November 1948, Raden Mas Suryo bersama tahanan lainnya dalam kondisi memakai celana dalam dan ditutup matanya dibawa oleh gerombolan PKI menuju tepi Kali Kakah di Dusun Ngandu. Ternyata tujuan mereka adalah untuk menghabisi nyawa Raden Mas Suryo bersama empat tahanan lainnya dengan keji (Jannah, 2023: 3).

Dampak terbunuhnya Raden Mas Suryo, Indonesia kehilangan sosok pemimpin yang sangat berjasa, pantang menyerah, bertanggung jawab, dan berdedikasi terhadap kewajibannya telah pergi untuk selamanya. Raden Mas Suryo berhasil memimpin rakyat Jawa Timur dalam menghadapi tembakan-tembakan, bom meriam dari tentara Inggris namun justru dibunuh secara keji oleh pengkhianat bangsanya sendiri yaitu pasukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini membuktikan bahwa aliran komunis sangat berbahaya apabila tidak dimusnahkan, ribuan nyawa tidak bersalah menjadi korban kekejaman mereka demi tujuan untuk mendirikan sebuah negara baru beraliran komunis (Kurniawati, 2013: 57).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo atau Raden Mas Suryo merupakan seorang Gubernur pertama Provinsi Jawa Timur yang memimpin pemerintahan selama kurang lebih dua tahun pada masa revolusi kemerdekaan. Raden Mas Suryo membuktikan bahwa dalam kepemimpinannya yang sebentar mampu menjadi sosok pemimpin yang diteladani dan dihormati rakyatnya serta membangkitkan semangat perjuangan rakyat Jawa Timur dalam upaya perlawanan terhadap tentara Sekutu untuk mempertahankan kedaulatan negara, sehingga dapat diambil kesimpulan, yaitu:

- 1) Raden Mas Suryo merupakan seorang gubernur yang memiliki jiwa patriot, berani, dan tidak gentar menghadapi berbagai ancaman bangsa asing. Hal ini sudah terlihat sejak masih menjadi Bupati Magetan dalam menghadapi tekanan yang diberikan perwira Jepang. Sama seperti halnya saat menjabat sebagai gubernur, sifatnya tetap tidak berubah meskipun menduduki jabatan yang lebih tinggi sebagai pimpinan dalam pemerintahan Jawa Timur. Dalam sehari-hari, Raden Mas Suryo dikenal sebagai sosok yang berwibawa, rendah hati, dan disiplin baik ketika sedang melakukan interaksi dalam keluarga maupun dengan rakyatnya. Berbeda ketika Raden Mas Suryo berhadapan dengan perwira-perwira Sekutu yang terkenal sombong, Raden Mas Suryo memperlihatkan sikap tidak gentar dan tegas yang menyebabkan perwira tersebut merasa segan. Jikalau Raden Mas Suryo bukan seorang yang gagah berani dan penakut, maka sikap serta tindakannya tidak mungkin seperti itu artinya perilaku tersebut hanya dimiliki oleh seseorang yang sadar akan harga dirinya sebagai pemimpin dan Raden Mas Suryo merupakan sosok yang sangat tepat memimpin rakyat pada masa revolusioner seperti yang terjadi di Jawa Timur.
- 2) Dalam perjalanan karirnya, Raden Mas Suryo memulai pendidikannya di Sekolah Ongko Loro kemudian pindah ke *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Setelah lulus, Raden Mas Suryo melanjutkan sekolah di *Opleidings School Voor Indlandsche Ambtenaar* (OSVIA) hingga tahun 1918. Beliau diangkat sebagai *Asisstant Indlandsche Bestuursambtenaar* di kantor urusan daerah Ngawi selama kurang lebih dua tahun. Pada tahun 1920, Raden Mas Suryo mendapat tugas di Madiun sebagai *Mantri Veld Politie* pada, dari sinilah Raden Mas Suryo mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di akademi kepolisian daerah Sukabumi. Raden Mas Suryo kembali ke Jawa Timur setelah menyelesaikan sekolahnya untuk menjadi Asisten Wedana di wilayah Madiun pada 1922. Kedudukan Raden Mas Suryo terus mengalami kenaikan jabatan dengan diangkat menjadi Wedana di Mojokerto kemudian Sidoarjo. Pada tahun 1943, dirinya diangkat sebagai

Syucokan atau Residen Bojonegoro oleh pemerintah militer Jepang. Raden Mas Suryo merupakan salah satu tokoh Indonesia yang dipercaya untuk menjabat di pemerintahan selain Soekarno, Supomo, Abdul Rasyid, Muhammad Yamin, Mochtar Mangkunegoro, Suwandi, dan Prawoto. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Raden Mas Suryo mencapai puncak karirnya sebagai Gubernur pertama Provinsi Jawa Timur setelah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Penunjukkan tersebut berdasarkan sifat dan karakter seorang pemimpin yang ia miliki serta pengabdianya sebagai pegawai pamongpraja yang bekerja untuk bangsa dan negara.

- 3) Salah satu aspek penting yang ada dalam pemerintahan Gubernur Suryo pada masa awal kemerdekaan adalah kebijakan sosial. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membangun sebuah pondasi yang kuat dan menyatukan seluruh masyarakat Jawa Timur dalam semangat kemerdekaan. Beberapa kebijakan diantaranya dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada masa pemerintahan Gubernur Suryo, aspek ekonomi menjadi salah satu fokus pusat perhatian untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Pengangkatan dirinya sebagai Gubernur pada masa revolusi membuat tidak banyak yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Gubernur Suryo melakukan beberapa upaya kebijakan untuk menghadapi tantangan ekonomi pasca kemerdekaan seperti melakukan penghimpunan dana, mengembangkan pertanian dan koperasi, dan meningkatkan perdagangan.
- 4) Kedatangan tentara Sekutu pada 25 Oktober 1945 di Surabaya menimbulkan ancaman bagi bangsa. Diketahui Sekutu bersama tentara *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) ingin menguasai kembali wilayah Indonesia dengan mengeluarkan ultimatum terhadap rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk segera tunduk dan menyerahkan senjatanya. Menanggapi perintah tersebut, Gubernur Suryo bersama dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Polisi, laskar perjuangan, dan rakyat Jawa Timur yang tidak ingin merasakan dijajah kembali menegaskan untuk menolak perintah ultimatum tentara Sekutu. Keputusan Gubernur Suryo tersebut melahirkan sebuah pertempuran besar 10 November 1945 di Surabaya yang berlangsung hingga tiga minggu. Pertempuran 10 November 1945 mengakibatkan sebanyak 20.000 pejuang rakyat Surabaya tewas, 150.000 warga mengungsi, dan 1.600 tentara Sekutu tewas maupun luka-luka. Pada awal tahun 1947, Belanda berhasil menduduki wilayah Sidoarjo sehingga pusat pemerintahan segera dipindahkan ke daerah Malang diikuti oleh Gubernur Suryo bersama dengan stafnya. Perpindahan pusat pemerintahan kerap dilakukan seiring tentara Belanda berhasil menguasai wilayah Jawa Timur. Pada Juni 1947, Gubernur Suryo mendapatkan tugas baru sebagai Wakil Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Yogyakarta. Oleh karena itu, ia digantikan oleh Dr. Murjani sebagai Gubernur Jawa Timur. Pada bulan November 1948, Raden Mas Suryo mengalami peristiwa tragis dengan dibunuh secara kejam oleh gerombolan Partai Komunis Indonesia (PKI) saat menghadiri acara 40 harian adiknya di Madiun. Selama perjalanan, ia beserta dua pengawalnya dicegat oleh pasukan PKI pimpinan Maladi Yusuf di daerah Kedunggalur, Ngawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Abijaya Sastra, Wildanu Eka, J. A. (2021). "Peranan Kepemimpinan Dalam Organisasi (Studi Kasus Peran Pimpinan dalam Menjaga Solidaritas Karyawan di PT.Nippon Indosari Corpindo)." *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 17–26.
- Basundoro P, dkk. (2018). *Pasak Sejarah Indonesia Kekinian Surabaya 10 November 1945*. Surabaya : Bag.Humas Pemerintah Daerah Kota Surabaya.
- Dani, A & Purwaningsih. (2017). "Kepemimpinan Gubernur Suryo dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya." *Jurnal Pendidikan Serajah*, 5(3), 1082—1099.
- Dirja, I.P. (2021). "Kendala dan Optimalisasi Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Dengan Otonomi Daerah." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 18(1), 52-62.
- INDRAWATI, M. (2018). "Peran Doel Arnowo Di Surabaya Tahun 1945-1952." *Avatara*, 6(1),206-220.

- Kartini, K. (1998). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartini, K. (2008). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartodirjo, S. (2014). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi*. Yogyakarta: Ombak.
- Kusuma Endra, Anwar Syaiful, Risman Helda, A. R. (2021). "Pertempuran Surabaya Tahun 1945 Dalam Perspektif Perang Semesta." *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2825-2835.
- Manus MPB, dkk. (1993). *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ohorella G.A, dkk. (2001). *Sejarah Lokal : Peranan Rakyat Besuki (Jawa Timur) Pada Masa Perang Kemerdekaan*. (1st ed.). Jakarta : Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional.
- Rivai V, M. D. (2011). *Kepimpinan dan Perilaku Organisasi*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi K, H, Soewarno & Umiati (1991). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suradinata, E. (1995). *Psikologi Kepegawaian dan Peranan Pimpinan Dalam Motivasi Kerja*. Bandung: CV Ramadan
- Sutjiatiningsih. (1977). *Pahlawan Nasional Gubernur Suryo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Terry, George R & Rue, L. W. (2010). *Dasar-dasar Manajemen* (cetakan 11). Jakarta: Bumi Aksara.